Dinamika Peran Relasi Berbagi Komunal dan Kepatuhan terhadap Qanun dalam Kesediaan Menjadi Saksi
Aktif pada Kasus Khalwat di Aceh
Mutia Arrisha, Prof. Dr. Faturochman, M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dinamika Peran Relasi Berbagi Komunal dan Kepatuhan terhadap Qanun dalam Kesediaan Menjadi Saksi Aktif pada Kasus Khalwat di Aceh

Mutia Arrisha[1], *Faturochman*[2]
[1,2]Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
[1]mutiaarrisha@mail.ugm.ac.id [2]faturpsi@ugm.ac.id

Abstrak

Peningkatan kasus khalwat menunjukkan paradoks di tengah pelaksanaan syariat di Aceh. Selain keberadaan Wilayatul Hisbah sebagai aparatur penegak hukum formal, peran masyarakat sebagai kontrol sosial informal dianggap krusial dalam mengintervensi pelanggaran norma sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menguji mekanisme psikologis yang mendasari kesediaan masyarakat untuk bertindak sebagai saksi aktif dalam kasus khalwat, dengan menguji peran relasi berbagi komunal dan kepatuhan terhadap Qanun. Melalui pendekatan kuantitatif *cross-sectional*, penelitian ini melibatkan 265 masyarakat Aceh berusia 18 hingga 55 tahun yang dipilih dengan *convenience sampling*. Data dikumpulkan menggunakan Skala Relasi Berbagi Komunal, Skala Kesediaan Menjadi Saksi Aktif, dan Skala Kepatuhan Terhadap Qanun. Hasil analisis Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) menunjukkan bahwa model struktural memenuhi kriteria *fit*. Peran kepatuhan terhadap Qanun sebagai mediator maupun moderator terbukti tidak signifikan. Sebaliknya, pengaruh langsung relasi berbagi komunal terhadap kesediaan menjadi saksi aktif terbukti signifikan. Temuan ini mengindikasikan adanya pemisahan orientasi psikososial dari jalur yang diuji. Kepatuhan terhadap Qanun bersifat vertikal (hubungan individu dengan otoritas formal), sementara kesediaan bertindak bersifat horizontal dan didorong sepenuhnya oleh ikatan komunal. Dengan demikian, penguatan institusi adat, kolaborasi antara Wilayatul Hisbah dan tokoh masyarakat, serta revitalisasi ikatan komunal perlu diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan.

Kata Kunci: *kesediaan bertindak, saksi aktif, berbagi komunal, kepatuhan aktif*

Dinamika Peran Relasi Berbagi Komunal dan Kepatuhan terhadap Qanun dalam Kesediaan Menjadi Saksi
Aktif pada Kasus Khalwat di Aceh
Mutia Arrisha, Prof. Dr. Faturochman, M.A
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Role Dynamics of Communal Sharing and Obedience to Qanun in the Willingness to Become an Active Bystander in Khalwat in Aceh

Mutia Arrisha[1], *Faturochman*[2]
[1,2]Psychology Department, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
[1]mutiaarrisha@mail.ugm.ac.id [2]faturpsi@ugm.ac.id

Abstract

The rising cases of khalwat (seclusion between non-mahram individuals) in Aceh reflect a paradox amidst the formalization of Islamic law. While the formal authority of the Wilayatul Hisbah (Sharia police) is established, the role of informal social control by the community is considered crucial in intervening in everyday norm violations. This study aims to examine the psychological mechanisms underlying the willingness to intervene as an active bystander in khalwat cases by testing the roles of communal sharing and obedience to the Qanun. Employing a quantitative cross-sectional approach, this study involved 265 Acehnese aged 18 to 55 years, selected using convenience sampling. Data were collected using the Communal Sharing Relations Scale, the Willingness to Be an Active Bystander Scale, and the Obedience to Qanun Scale. Structural Equation Modeling (SEM) analysis showed that the structural model met goodness-of-fit criteria. While the role of obedience to Qanun as a mediator or moderator was rejected, the direct effect of communal sharing relations on willingness to become an active bystander was significant. These findings indicate a psychosocial orientation separation: Obedience to Qanun operates vertically (an individual–formal authority relationship), whereas willingness to act is driven horizontally by communal bonds. Therefore, strengthening customary institutions, fostering collaboration between Wilayatul Hisbah and community leaders, and revitalizing communal ties should be policy priorities.

Keywords: *behavioral willingness, active bystander, communal sharing, engaged obedience*